



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
KECAMATAN GERUNGGANG**

Alamat :JalanDahlia V RT.02/01 Kel. Bukit Merapin
KecamatanGerunggang Kota Pangkalpinang
ProvinsiKepulauan Bangka Belitung

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang Tahun 2025 dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang. Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Atas tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, Juni 2025

CAMAT GERUNGGANG

Richard Syam, S.STP., M.AP
NIP. 198604292006021001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD..	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-3
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	II-5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	III-2
3.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

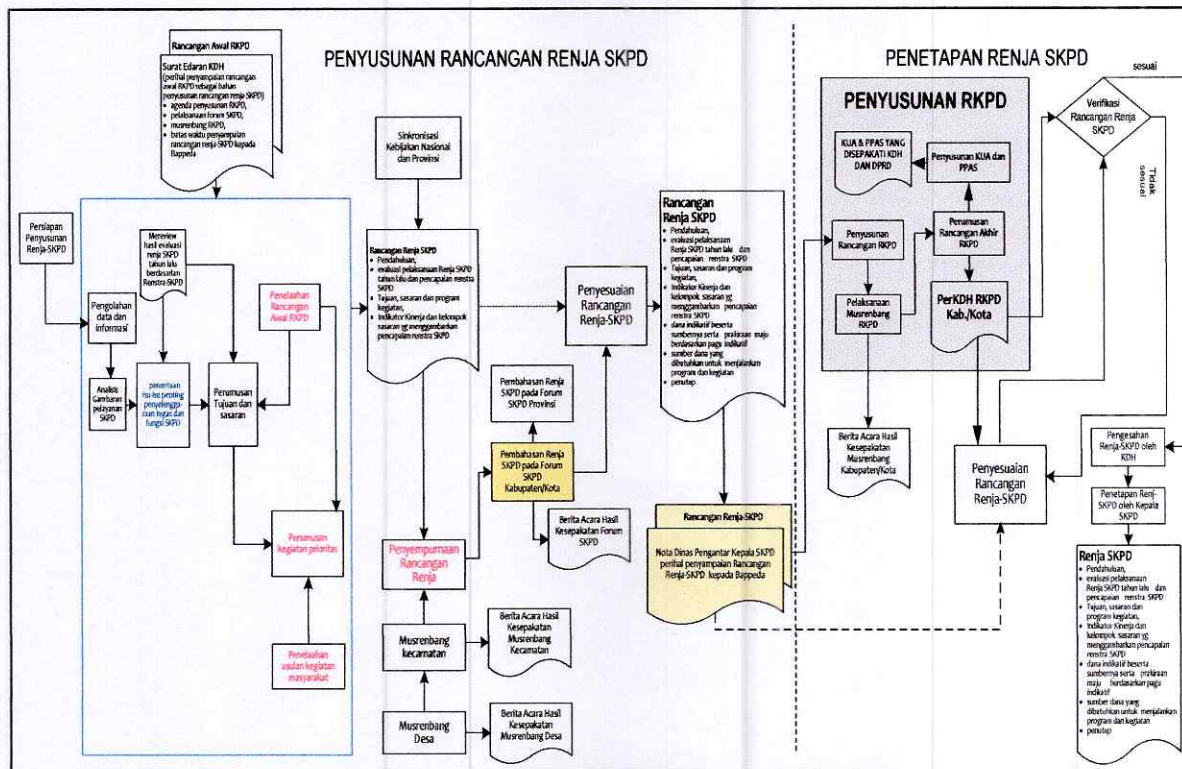
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Gerunggang mempunyai kegiatan yang prioritas dalam mendukung program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen program dan kegiatan yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Walikota terpilih yang telah tertuang dalam TRANSISI RENSTRA 2024 - 2026 Kecamatan Gerunggang dan telah tertuang juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025, yang mana ini merupakan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Transisi Rencana Strategis 2024 – 2026 Kecamatan Gerunggang.

Penyusunan dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ,antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja yang berpedoman pada Transisi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Gerunggang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, trakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Ecaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).

25. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
26. Perwako no 9 th 2023 ttg RPD Kota Pangkalpinang Th 2024-2026 (Berita Daerah tahun 2023 no 144)
27. Perwako no 13 th 2023 ttg Renstra PD Kota Pangkalpinang Th 2024-2026 (Berita Daerah tahun 2023 no 148)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Gerunggang Tahun 2025. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Gerunggang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan.

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu.

Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah.

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rancana Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah.

Menjelaskan Program dan Kegiatan beserta besaran dana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang sampai dengan Tahun 2025 (Tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang
Kota Pangkalpinang Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						I		II		III		IV						
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	-	070101	PROGRAM PENUNJANG U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	69	6.160.665.266	69	1.617.059.311			0		0	69	1.617.059.311	100	26	SEKRETARISKECAMATAN (Kecamatan Gerunggang)
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	3,8	6.160.665.266	3,8	1.617.059.311						4	1.617.059.311	100		SEKRETARISKECAMATAN (Kecamatan Gerunggang)
2		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	8.189.000		0		0		0	0			0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
3		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	1.290.000		0					0			0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
4		070101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2.155.000		0					0			0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
5		070101201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2.155.000		0					0			0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
6		070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.294.000		0					0			0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
7		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.295.000		0					0			0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

8	070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	5.483.803.548		1.606.306.311		0		0		0	0	1.606.306.311	0	29	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
9	070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	51	5.476.323.548	51	1.606.306.311						51	1.606.306.311		100	29	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
	070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	2.780.000		0						0			0	0	
	070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2	4.700.000		0						0			0	0	
12	070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	132.789.050		0		0		0		0			0	0	PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
13	070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	24.815.750		0						0			0	0	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14	070101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	0		0						0			0	0	PELAYANAN UMUM
15	070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	4	63.704.000		0						0			0	0	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16	070101206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	19.269.300		0						0			0	0	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17	070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	25.000.000	1	17.615.008						1	17.615.008		100	70	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18	070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	465.473.668		5.003.000		0		0		0	5.003.000		0	1	UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20	070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	63.300.000	1	5.003.000						1	5.003.000		100	8	PELAYANAN UMUM
21	070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	38.291.000		0						0			0	0	UMUM DAN KEPEGAWAIAN

22		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	363.882.668	1	93.693.704							93.693.704	100	26	U M U M D A N KEPEGAWAIAN
23		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	70.410.000		5.750.000		0		0		0	5.750.000	0	8	U M U M D A N KEPEGAWAIAN
24		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	5	70.410.000		5.750.000						0	5.750.000	0	8	U M U M D A N KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																100,000	26,248	
PREDIKAT KINERJA																		
26	-	070102	P R O G R A M PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.114.991.296	100	272.240.463		0		0		0	272.240.463	100	24	
27		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gerunggang) (Dengan Satuan:Persen)	100	103.626.500		0		0		0		0		0	0	Sekretaris camat
28		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	103.626.500		0						0		0	0	Sekretaris camat
29		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kecamatan Gerunggang) (Dengan Satuan:Persen)	100	953.269.796	100	272.240.463		0		0		0	272.240.463	100	29	PELAYANAN UMUM
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Merapi (Dengan Satuan:Persen)	100									0		0		Lurah Bukit Merapi
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Kepala Tujuh (Dengan Satuan:Persen)	100									0		0		Lurah Air Kepala Tujuh
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Sari (Dengan Satuan:Persen)	100									0		0		Lurah Bukit Sari

				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Tuatunu Indah (Dengan Satuan:Persen)	100									0			0		Lurah Tuatunu Indah
				Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kacang Pedang (Dengan Satuan:Persen)	100									0			0		Lurah Kacang Pedang
				Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100									0			0		Lurah Taman Bunga
30		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	7.433.500			0					0			0		0 PELAYANAN UMUM
31		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	945.836.296	1	272.240.463						1	272.240.463		100		29 Lurah Taman Bunga
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	152.438.216	1	45.379.293						1	45.379.293		100		30 Lurah Bukit Merapi
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	150.930.816	1	41.119.756						1	41.119.756		100		27 Lurah Air Kepala Tujuh
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	149.565.816	1	38.867.762						1	38.867.762		100		26 Lurah Bukit Sari
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	146.898.216	1	22.700.848						1	22.700.848		100		15 Lurah Tuatunu Indah
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	160.876.416	1	56.280.956						1	56.280.956		100		35 Lurah Kacang Pedang

32		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan: Persen)	100	58.095.000		0		0		0		0		0	0	0	KASI PEMERINTAHAN
33		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan: Laporan)	2	58.095.000		0						0		0		0	KASI PEMERINTAHAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	100,000	24,416	
PREDIKAT KINERJA																			
34		070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun (Kec. Gerunggang) (Dengan Satuan: %)	100	4.256.798.252	100	619.877.870		0		0		0	100	619.877.870	100	15	SEKRETARIS KECAMATAN (Kecamatan Gerunggang)
35		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan pada tingkat Kelurahan (Kecamatan Gerunggang) (Dengan Satuan: Persen)	100	17.551.580		0		0		0		0		0		0	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)
				Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan (Dengan Satuan: %)	100									0			0		Lurah Taman Bunga
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100									0			0		Lurah Bukit Merapi
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100									0			0		Lurah Alir Kepala Tujuh
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100									0			0		Lurah Bukit Sari
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100									0			0		Lurah Tuatunu Indah
				Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan: %)	100									0			0		Lurah Kacang Pedang
36		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan: Lembaga Kemasyarakatan)	6	14.251.580	6	7.730.000						6	7.730.000		100	54	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)
37		070103202002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan: Unit)	1	0		0									0	0	Lurah Taman Bunga

				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0							0	0	Lurah Bukit Merapin
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0							0	0	Lurah Alir Kepala Tujuh
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0							0	0	Lurah Bukit Sari
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0							0	0	Lurah Tuatunu Indah
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0							0	0	Lurah Kacang Pedang
38		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	3.300.000	0						0	-	0	0 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)
39		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gerunggang (Dengan Satuan:%)	100	4.239.246.672	100	619.877.870	0	0	0	0	100	619.877.870	100	15 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100								100		100	Lurah Taman Bunga
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100								100		100	Lurah Bukit Merapin
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100								100		100	Lurah Alir Kepala Tujuh
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100								100		100	Lurah Bukit Sari
				Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kelurahan (Dengan Satuan:%)	100								100		100	Lurah Tuatunu Indah
40		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	4.157.253.172	6	619.877.870					6	619.877.870	100	15 Lurah Taman Bunga

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	786.323.960	6	96.766.894					6	96.766.894	100	12	Lurah Bukit Merapin
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	626.506.528	6	95.371.898					6	95.371.898	100	15	Lurah Air Kepala Tujuh
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	676.934.028	6	97.706.293					6	97.706.293	100	14	Lurah Bukit Sari
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	687.350.784	6	95.231.696					6	95.231.696	100	14	Lurah Tuatunu Indah
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	6	701.990.936	6	98.203.093					6	98.203.093	100	14	Lurah Kacang Pedang
41		070103203002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditlin gkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	1	81.993.500	0					0	-	0	0	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														100,000	14,562	
PREDIKAT KINERJA																
42	-	070104	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kec. Gerunggang) (Dengan Satuan:%)	100	6.757.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARISKECAMATAN (Kecamatan Gerunggang)
43		070104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:%)	100	6.757.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
44		070104201001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	6.757.000	0					0	-	0	0	KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														0,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																
45	-	070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (Kec. Gerunggang) (Dengan Satuan:%)	100	293.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARISKECAMATAN (Kecamatan Gerunggang)

46		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Gerunggang) (Dengan Satuan:Persen)	100	293.170.000		0		0			0		0		0	0	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)		
47		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	1	293.170.000		0					0	-		0	0	0	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (KESRA)		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		0,000	0,000		
PREDIKAT KINERJA																					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																		100,000	21,742		
PREDIKAT KINERJA																					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:																					
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 30-03-2025  CAMAT GERUNGANG KOTA PANGKALPINANG RICHARD SYAM, S.STP, M.AP NIP.198604292006021001																					

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gerunggang pada Rencana Kerja yang lalu dapat kita lihat pada pencapaian kinerja Transisi Rencana Strategis 2024 – 2026 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang
Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indek Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Angka		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2.	Persentase Keluhan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen (%)		80	85	85	85	90	90	80	85	85	85	90	90	80	85	85	85	90	90

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja OPD Kecamatan Gerunggang apabila dinilai berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra sudah cukup baik dilihat dari persentase capaian kegiatan karena sebagian besar kegiatan telah terlaksana dengan baik. Pada Penyusunan Renja OPD kecamatan Gerunggang Tahun 2025 ini telah mensinkronisasikan dengan visi misi walikota terpilih tahun 2018-2023. Kecamatan mendukung pencapaian visi dan misi tersebut. Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD penyebabnya terdiri dari banyak faktor baik berupa hal-hal yang bersifat internal dari OPD kecamatan itu sendiri maupun hal-hal lain yang tidak dapat dikontrol sebagai faktor eksternal.

Permasalahan yang terjadi pada tugas pokok dan fungsi Pelayanan pada Kecamatan Gerunggang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Masih kurangnya SDM aparatur administrasi di kecamatan dan Kelurahan.
- 2) Proporsi dan distribusi SDM yang kurang berimbang.
- 3) Masih kurangnya Sarana operasional serta ruang/gedung yang terkait pelayanan publik.
- 4) Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan penguasaan teknologi informasi;

b. Permasalahan terkait Bidang Tata Pemerintahan

- 1) Kurangnya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan dibidang pengelolaan Pemerintahan, pengelolaan data Kelurahan, pengelola data kependudukan dan pertanahan.
- 2) masih kurang aktifnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, sehingga banyak dari masyarakat yang masih enggan berurusan ke Kecamatan dalam hal pelayanan pemerintahan.
- 3) Peran serta para pemuda dalam organisasi dilingkungan Kecamatan belum begitu signifikan.

c. Permasalahan terkait Bidang Seksi Pelayanan Umum

- 1) Kurangnya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan dibidang Pelayanan administrasi publik dalam hal ini Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 2) Belum adanya Standar Operasional Prosedur dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

d. Permasalahan terkait Bidang Pembangunan

- 1) Masih banyaknya aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dalam pembangunan kota Pangkalpinang.
- 2) Belum ada diterbitkan tentang sanksi kepemilikan IMB dan tidak adanya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan

e. Permasalahan terkait Bidang Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kurangnya kualitas SDM dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan data kesejahteraan masyarakat.

f. Permasalahan terkait Bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Kurangnya SDM dalam bidang keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian keamanan dan ketertiban.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

Tujuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gerunggang dalam Rencana Kerja merupakan penjabaran dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan prioritas Nasional dan Provinsi Bangka Belitung dan Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gerunggang adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dilakukan terhadap seluruh kelurahan secara berkesinambungan. Peningkatan kualitas administrasi, meliputi peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat di wilayah kecamatan Gerunggang. Yang mana hal ini berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Gerunggang berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 58 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Gerunggang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Rumusan Tujuan

No	Isu Strategis	Tujuan
1	2	3
1	Rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Gerunggang
2	Masih rendahnya pemahaman perihal penegakan PERDA	
3	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerintahan kecamatan.	
4	Pelayanan Publik	
5	Pembangunan infrastruktur	

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Gerunggang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Kecamatan Gerunggang. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Gerunggang yang akan dicapai adalah

**“Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Gerunggang” dan
“Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Gerunggang”.**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Gerunggang

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
						2021/2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Gerunggang		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan Gerunggang	PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	%	98,64	86,00	87,00	88,00
		Terselenggaranya Pelayanan Publik di Kecamatan Gerunggang	Persentase Peyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Gerunggang	Jumlah Surat Keterangan atau Rekomendasi dan Lain- lain yang Dikeluarkan oleh Kecamatan Tahun Berkenaan/ Jumlah Permintaan Surat Keterangan Atau Surat Rekomendasi dan Lain-lain Dari Masyarakat yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %	%	100	100,00	100,00	100,00
		Terselesaikannya Permasalahan dan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Gerunggang	Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %	%	100	100,00	100,00	100,00

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan, hingga sub kegiatan. Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2025 mengacu pada peraturan berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya keputusan menteri ini, praktis seluruh nomenklatur program maupun kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam dokumen RPJMD) mengalami perubahan dan perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk reklasifikasi dan rekodefikasi;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
4. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

a. Dasar pertimbangan penentuan program dan kegiatan

Dalam Renja Kecamatan Gerunggang Tahun 2025, penentuan program dan kegiatan yang prioritas maupun non prioritas didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan tertentu terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gerunggang. Program dan kegiatan yang dipilih dianggap dapat mengakomodir dan menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gerunggang, terutama yang berkaitan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Daerah.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi unsur kewilayahan Tahun 2025 dijabarkan dalam program dan kegiatan berikut ini :

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator
5	6	7	8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Prima Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Penilaian APIP
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Dengan Metode Survey
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Disusun Tepat Waktu Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Sesuai SAP	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai SAP Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Seluruh Laporan Keuangan yang Disusun Tahun Berkenaan x 100 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Menurunnya Pelanggaran Disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN Tahun Lalu x 100 %
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tercantum Dalam APBD Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan x 100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terealisasi Tahun Berkenaan (unit) Dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan (unit) x 100 %
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tercantum Dalam APBD Tahun Berkenaan Dibagi Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Direncanakan Dalam Renja Tahun berkenaan x 100 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Terpelihara Dengan Baik Tahun Berkenaan (unit) Dibagi Jumlah Seluruh Barang Milik Perangkat Daerah yang Ada Tahun Berkenaan (unit) x 100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gerunggang	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gerunggang	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan / Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang Direncanakan Dalam Renja Tahun Berkenaan x 100 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah sub kegiatan penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintahan penugasan kepala daerah yang direncanakan dalam Renja Tahun berkenaan x 100%
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal (STQ/MTQ)	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Gerunggang	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun di Kecamatan Gerunggang	Jumlah Sarana Prasarana Publik yang Dibangun Tahun Berkenaan (unit) / Jumlah Sarana dan Prasarana Publik yang Akan Dibangun Tahun Berkenaan (unit) x 100 %
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Gerunggang	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan Gerunggang	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Gerunggang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan

		Gerunggang	
Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Taman Bunga	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Taman Bunga	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Bunga	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Bunga yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Merapin	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Merapin	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Merapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Merapin yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Air Kepala Tujuh	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Kepala Tujuh yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Sari	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Sari	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Sari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Sari yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tua Tunu Indah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tua Tunu Indah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Tua Tunu Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Tua Tunu Indah yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kacang Pedang	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kacang Pedang	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RENJA tahun berkenaan x 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Kacang Pedang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kacang Pedang yang Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun

	Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan yang Aktif / Jumlah Seluruh Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan x 100 %
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Gerunggang	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gerunggang	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dikelurahan
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Taman Bunga	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Taman Bunga	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Taman Bunga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Taman Bunga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Taman Bunga
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Merapin	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Merapin	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Bukit Merapin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Merapin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Merapin
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Air Kepala Tujuh	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Air Kepala Tujuh
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bukit Sari	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Sari	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Bukit Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Sari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Bukit Sari
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tua Tunu	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan

	Indah	Kelurahan Tua Tunu Indah	tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Tua Tunu Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Tua Tunu Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Tua Tunu Indah
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Kacang Pedang	Persentase kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kelurahan Kacang Pedang	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan tahun berkenaan dibagi kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan dalam renja tahun berkenaan x 100%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan Kacang Pedang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Kacang Pedang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan di Kelurahan Kacang Pedang
		Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	Jumlah permasalahan di masyarakat yang ditindaklanjuti tahun berkenaan / Jumlah permasalahan atau laporan pengaduan masyarakat yang terjadi tahun berkenaan x 100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah waktu pelayanan administrasi tepat waktu yang terselenggara dibagi jumlah waktu pelayanan administrasi tepat waktu x 100 %
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Gerunggang	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Gerunggang	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Gerunggang	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Gerunggang	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Taman Bunga	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Taman Bunga	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak

			dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Taman Bunga)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Taman Bunga)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Taman Bunga)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Merapin	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Merapin	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Merapin)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Merapin)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Merapin)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Kepala Tujuh	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Air Kepala Tujuh)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Air Kepala Tujuh)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Air Kepala Tujuh)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Sari	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Sari	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Sari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Sari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bukit Sari)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Tua Tunu Indah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Tua Tunu Indah	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang

			direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tua Tunu Indah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tua Tunu Indah)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tua Tunu Indah)
	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kacang Pedang	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kacang Pedang	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang dilaksanakan tahun berkenaan dibagi jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kelurahan yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kacang Pedang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kacang Pedang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kacang Pedang)
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Gerunggang	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Gerunggang	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan tahun berkenaan Dibagi Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gerunggang	Persentase Keluhan Masyarakat yang Ditindaklanjuti di Kecamatan Gerunggang	Jumlah Laporan atau Pengaduan dari Masyarakat yang Ditindaklanjuti Tahun berkenaan / Jumlah Laporan Atau Pengaduan yang Diterima Tahun Berkenaan x 100 %
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tahun berkenaan dibagi jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang direncanakan tahun berkenaan x 100%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang dicapai dengan didukung indikator setingkat outcome masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai targetnya untuk pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gerunggang ini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengembangan sumber daya pegawai dan sumber daya masyarakat. dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai. Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan sampai saat ini adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan belum jelas status dan legitimasinya sehingga dalam pelaksanaan tugas sering terjadi tumpang tindih dan keterbatasan sarana penunjang kegiatan kantor dan pemerintahan yang belum memadai sehingga berpengaruh kepada pemberian pelayanan kepada masyarakat, diperlukan penataan sistem informasi kependudukan di kecamatan yang lebih maju dan tersistematis dengan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga sistem pelayanan yang diberikan pun lebih cepat dan efektif serta tersedianya data yang lebih akurat dan sistematis.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi, sebagian pelimpahan yang diwenangkan serta tugas-tugas lain dari pemerintah kota merupakan embrio kecamatan akan menjadi pusat pelayanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana termasuk penambahan dana yang terpisah dari anggaran rutin kecamatan dikarenakan saat ini kecamatan bukan lagi sebagai kepala

wilayah melainkan tempat wilayah kerja bagi fungsi-fungsi lain yang melekat di satuan kerja, dengan demikian pelimpahan kewenangan sepenuhnya kepada kecamatan sangat diperlukan guna pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan tugas ke depan untuk dapat mencapai Visi Misi Walikota terpilih serta sasaran dan tujuan Kecamatan Gerunggang, diharapkan juga kepada semua unit organisasi di lingkungan Kecamatan Gerunggang dan masyarakat untuk dapat memberikan masukan yang penting serta secara aktif mendiskusikan isu aktual yang berkembang saat ini dan permasalahan yang masih perlu dicarikan solusinya agar dapat terumuskan dengan baik di dalam Rencana Kerja Kecamatan Gerunggang tahun 2025. sehingga tahun berikutnya target dari rencana kerja dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran.

Pangkalpinang, Juni 2025
CAMAT GERUNGGANG



RICHARD SYAM, S.STP., M.AP
NIP. 19860429 200602 1001